



## Mengapa Ambon Rusuh Lagi?

Bertepatan dengan peringatan ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS) –Minggu, 25 April 2004, pulau Ambon kembali dibakar api kerusuhan sosial. Padahal, sebelumnya, sejak penghujung 2002 hampir tak ada lagi peristiwa kekerasan massal yang terjadi disana. Orang telah kembali berinteraksi lintas golongan dan agama, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Pemilu 2004 juga telah berlangsung dengan relatif tertib dan aman, tanpa kekerasan massal, meski berbagai partai politik dengan beraneka ideology dan atribut politik berkompetisi dengan sengit selama masa kampanye.. Namun peristiwa “Kerusuhan 25 April 2004” menunjukkan bahwa tragedi kekerasan sosial yang terjadi sejak 19 Januari 1999 hingga pertengahan 2002 masih meninggalkan luka-luka sosial yang mendalam di Ambon.

Mengapa damai masih rentan di Ambon? Ada sejumlah faktor yang bisa menjelaskan soal ini. *Pertama*, konflik komunal yang terjadi sejak 19 Januari 1999 telah menghasilkan terjadinya segregasi komunitas di pulau Ambon: ada “daerah Islam”, ada “daerah Kristen”. Pemukiman campuran (Islam-Kristen) yang mulai tumbuh dan berkembang sebelum terjadinya kerusuhan sosial kini hilang, dan orang kembali kepada pemukiman berdasar agama masing-masing.

*Kedua*, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di

Ambon. Hal ini semakin buruk dengan masih banyaknya pengungsi yang belum kembali ke daerah asal dan masih menumpuk di kota Ambon. Kenyataan sosial ekonomi tersebut membuat Ambon menjadi daerah yang masih menyimpan potensi konflik besar

*Ketiga*, masih banyaknya senjata (baik rakitan maupun standar militer) yang masih dimiliki secara illegal oleh masyarakat. Diperkirakan, masih ada sekitar 500 senjata organik yang masih beredar secara illegal di masyarakat dan ratusan lain senjata dan bom rakitan. Masih

tersedianya instrumen kekerasan berteknologi modern maupun sederhana tersebut membuat potensi kekerasan menjadi semakin besar.

*Keempat*, masih adanya kelompok “garis keras” didalam dua komunitas tersebut. Dalam komunitas Kristen, kelompok ini sebagian besar berafiliasi kepada Forum Kedaulatan Maluku (FKM) yang merupakan penerus gerakan separatist Republik Maluku Selatan (RMS). Sedang di komunitas Islam, kelompok ini sebagian besar tergabung dalam kelompok lasykar-laskar yang berafiliasi kepada (dulunya) “Laskar Jihad” dan kelompok sejenisnya.

*Kelima*, masih adanya kelompok “garis keras” di kalangan aparat keamanan, yang masih percaya kepada efektivitas penggunaan kekerasan secara modus terbaik dalam penanganan konflik di Ambon dan berupaya untuk

2 Yang Terlupakan dari Ambon

3 SEACSN, Melangkah Maju Memperkuat Jaringan

4 Kajian Buku: Membaca Kembali Konflik di Asia Tenggara

5 Khabar

6 Profil: Otto Syamsudin Ishak

7 Artikel: Konflik Papua

9 Regional: Perkembangan Perdamaian di Thailand

10 Pojok MPRK

## Yang Terlupakan dari Ambon

oleh Lambang Trijono

Ambon kembali bergolak. Ini cukup mengagetkan kita. Publik selama ini berfikir Ambon aman-aman saja. Warga ambon sendiri selama satu tahun terakhir sedang giat membangun perdamaian menyongsong masa depan lebih baik, setelah lama terpuruk dalam konflik.

Tapi orang lupa bahwa potensi konflik masih tersimpan di dasar samodra masyarakat pasca-konflik Ambon. Masyarakat Ambon pasca konflik masih sangat rentan (*fragile*). Konflik baru-baru ini setidaknya didasari oleh setting perubahan masyarakat pasca konflik Ambon dalam tiga ranah.

*Pertama*, terjadi pergeseran politik yang menguntungkan salah satu komunitas (*Kristen*) dan mengecewakan komunitas lain (*Muslim*). Jabatan politik di era pasca konflik, khususnya di Ambon, diisi oleh tokoh-tokoh dari kalangan Kristen. Demikian itu, meski hasil dari proses pemilu dan pemilihan kepala daerah yang sah, bagi

sebagian elit yang merasa tersingkir (*Muslim*), konflik kemarin dianggap menguntungkan komunitas Kristen. Persoalan demikian jelas mengganggu efektivitas pemerintah dalam kebijakan pembangunan dan perdamaian.

*Kedua*, sesudah perjanjian Malino, komunitas Ambon giat membangun dengan harapan perdamaian sangat tinggi. Namun, dalam praktek di lapangan program-program pembangunan dan perdamaian kurang menyentuh masalah pasca konflik seperti kecemburuan social, segregasi Muslim-Kristen, pengungsi, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Tidak terpecahkannya masalah ini menimbulkan banyak kekecewaan yang menjadi potensi baru pasca konflik Ambon.

*Ketiga*, konflik Ambon terkait dengan banyak faktor, baik bersifat akar maupun cabang-cabang masalah yang muncul pada pasca konflik. Masalah-masalah seperti krisis pemerintahan, keamanan, kesenjangan sosial-ekonomi, kesenjangan kelas social-ekonomi. Masalah-masalah ini belum tersentuh oleh berbagai kebijakan dan respon pembangunan dan perdamaian selama ini. Akar konflik masih seperti api dalam sekam, yang setiap waktu bisa meledak.

Diatas berbagai masalah ini, pertikaian antara kelompok FKM dan pendukung NKRI baru-baru ini hanyalah sebagai pemicu (*trigger*) saja. Ibaratnya seperti gelombang permukaan yang menghujam ke bawah arus pusaran dasar samudra. Hal itu ditambah dengan faktor mobilisasi konflik oleh pihak ketiga bisa mengoncang gelombang konflik Ambon menjadi konflik besar seperti terjadi sekarang ini. Jadi konflik ini tidak perlu dibesarkan, karena bukan masalah sejati konflik Ambon.

Tapi, perlu diingat bahwa ini adalah persoalan kota Ambon, bukan persoalan Maluku secara keseluruhan. Daerah-daerah kabupaten di luar kota Ambon seperti Tual, Masohi, dan Buru, relatif aman berjalan seperti biasa. Tidak bisa digeneralisir. Meski potensi konflik ada, tetapi mereka relatif masih berharap banyak dengan perbaikan-perbaikan yang terjadi selama ini.

Di Tual misalnya, pemerintahannya mendapat legitimasi yang kuat dari warganya karena adat dan tokohnya menjadi sumber semangat, orientasi, dan roh, dalam menjalankan roda pemerintahan. Kapasitas lokal mereka miliki untuk mengatasi konflik-konflik sehari-hari yang muncul sehingga tidak menjadi kekerasan. Hal itu juga berlangsung di Buru dan Masohi, meski dengan derajad berbeda.

Kapan Ambon seperti Tual dan daerah lainnya? Kapan daerah lain mempengaruhi Ambon, bukan sebaliknya? Seperti dalam semangat revolusi “*desa-desa mengepung kota*” atau “*daerah-daerah mengepung pusat*”, dengan *revolusi damai* tentu saja. Untuk itu, dukungan untuk memperkuat basis kapasitas lokal untuk perdamaian sangat diperlukan. ❖

### Pela Newsletter

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian-PSKP  
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**Editorial Board:** Lambang Trijono (Chief), M. Najib Azca, Tri Susdinarjanti, Samsurizal Panggabean ■ **Executive Editor:** Moch. Faried Cahyono ■ **Editorial Members:** Diah Kusumaningrum, Doddy Wibowo, Kristina Sintia Dewi, Ni Komang Widiani, Novri Susan, Nurul Aini, Tetty Naiborhu ■ **Treasurer:** Liza Laela Mardiana ■ **Language Editor:** Frans Vicky de Djalong ■ **Layout/Artistic:** Arif Surachman, Syarafuddin ■ **Address:** Editorial Board, PELA Newsletter, Sekip K-9, Yogyakarta 55281. Phone/Fax.: 0274-520733 Email: seacsn@jmn.net.id.

# SEACSN, Melangkah Maju Memperkuat Jaringan

oleh Lambang Trijono  
Koordinator SEACSN-Indonesia

*Southeast Asian Conflict Studies Network* atau dikenal luas dengan nama SEACSN adalah sebuah Jaringan. Bukan lembaga, organisasi atau asosiasi. Itulah salah satu hasil kesepakatan anggota tetap jaringan ini dari 9 negara di ASEAN. Identitas sebagai jaringan ini dikukuhkan dalam konstitusi SEACN setelah selama tiga tahun malang melintang berkiperah dalam upaya perdamaian di kawasan ASEAN.

Pengukuhan ini sekaligus mengakhiri perdebatan panjang diantara anggota SEACSN dalam serangkaian pertemuan di Bangkok, Thailand, awal tahun 2004 dalam upaya mencari identitas dan jati diri bagaimana SEACSN bekerja dalam konteks ASEAN mutakhir.

Konstitusi itu merupakan hasil rumusan komite konstitusi, beranggotakan lima anggota senior SEACSN, yaitu Lee Lai Too dan Bilver Sigh (Singapura), Kamarulzaman Askandar (Malaysia), Lambang Trijono (Indonesia), dan Shot Plai Ngarm (Cambodia). Rumusan itu kemudian dikukuhkan dalam rapat dihadiri seluruh koordinator sembilan (9) negara

ASEAN plus tiga (3) delegasi dari masing-masing negara. Dengan itu, kini jelas sudah apa bentuk dari SEACSN, meski jaringan itu harus diwujudkan dalam tindakan kolektif nyata.

Jaringan pada esensinya adalah sebuah arena sosial (*social space*) bukan struktur, organisasi atau lembaga. Sebagai arena sosial, jaringan tidak berstruktur secara ketat, tetapi lebih sebagai arena dimana gagasan di *reproduksi*. Disini masing-masing anggotanya merupakan lembaga atau individu atau subjek-subjek yang otonom, mandiri, dan secara bebas berinisiatif dan bertindak mewujudkan gagasan perdamaian.

Dengan kata lain, jaringan adalah sebuah bentuk kolektivitas yang longgar, terdiri dari kumpulan subjek pribadi-pribadi yang bebas dan otonom memproduksi wacana (*discourse*) mengisi ruang sipil kreatif dan produktif, sebagai wacana tandingan (*counter discourse*) atas wacana tunggal hegemoni negara.

Meski demikian bukan berarti SEACSN merupakan jaringan tanpa bentuk. Memang berbagai kasus menunjukkan, format jaringan sangat bermacam-macam. Bisa bersifat sangat longgar, kurang proaktif, sebagai arena berbagi informasi semata, atau forum dialog, dengan komitmen anggotanya yang masih rendah. Bisa juga bersifat lebih ketat, terstruktur, melembaga, terkoordinasi, bersifat pro-aktif melakukan berbagai gerakan advokasi, kampanye, dan tindakan kolektif bersama, didasari komitmen kolektif yang tinggi.

Semula pada tahun-tahun pertama, SEACSN bersifat sangat longgar, dengan keanggotaan sangat terbuka. Namun mereka

## Mengapa Ambon...

Sambungan dari halaman 1

meneruskan eksistensi mereka dalam situasi pasca konflik. Dalam kaitan ini, berkuatnya paradigma militer dalam penanganan kekerasan dengan cara-cara non dialogis, atau mengabaikan pertautan structural dan cultural, maka semua itu dapat menjadi mesin produksi kekerasan yang permanen di kemudian hari di daerah-daerah yang dianggap "rawan konflik". Itu berarti, bukan mustahil jikalau negara (pemerintahan saat ini) yang senantiasa memelihara kaum fundamentalisme militer, kemungkinan selalu memperkeruh keadaan.

Di atas semuanya, faktor terpenting yang membuat damai masih rapuh di Ambon adalah: masih kuatnya perasaan saling tidak percaya (*mutual distrust*) di antara berbagai kalangan di masyarakat;

baik antara komunitas Islam dan Kristen, maupun antara masyarakat dan pemerintah, khususnya pihak aparat keamanan.

Catatan penting yang perlu dijelaskan dalam mengakhiri tulisan ini bahwa, dibalik kondisi "formalisme" damai ambon sejauh ini, nampaknya kerawanan sipil dalam bayang-bayang persoalan structural masih menjadi persoalan mendasar. Artinya, penghentian konflik (kondisi damai pada aras permukiman), belum menjadi petunjuk penguatan sipil (apalagi transformasi sipil), sehingga mampu menjadi prasyarat pelembagaan damai saat ini dan kedepan. Dengan begitu, kami menilai negara masih cukup dominan sejauh ini menjadi penentu kondisi konflik dan kekerasan, sebagaimana terjadi di Ambon. Disanalah, variable politik negara (interaksi antar kepentingan dalam proses kekuasaan) dalam pergulat-

an politik di nasional dapat dijelaskan kemungkinan senantiasa berkaitan dengan terciptanya panggung-panggung konflik di daerah.

Dengan demikian, faktor-faktor di atas, ditambah dengan sejumlah factor lainnya, seperti trauma pasca konflik, isu FKM-RMS, penegakan hukum dan keadilan yang masih lemah, membuat kondisi perdamaian di Ambon masih rentan dan rapuh. Dalam rangka membangun perdamaian yang langgeng di Ambon maupun Maluku pada umumnya, faktor-faktor kerentanan sosial tersebut harus ditangani dengan cermat, seksama dan serius. Jika tidak, kita masih akan menghadapi peristiwa-peristiwa kekerasan kolektif serupa di masa-masa mendatang. ♦ (Najib Azca dan Arie Sujito, "Membaca Situasi Ambon Terkini", pokok-pokok pikiran diskusi PSKP, Yogyakarta, 28 April 2004).

bertemu secara rutin dalam berbagai aktivitas seperti penelitian bersama, lokakarya nasional, lokakarya regional, dan seminar. Kini jaringan SEACSN sudah semakin luas melibatkan akademisi dan praktisi dari berbagai negara. Intensitas pertemuan diantara mereka membawa semangat dan solidaritas bersama merespon berbagai isu konflik dan perdamaian di tingkat regional dan nasional.

Tantangan utama SEACSN ke depan adalah bagaimana membangun komitmen anggotanya untuk melakukan tindakan kolektif bersama, melakukan advokasi kebijakan untuk penanganan konflik lebih baik di kawasan ini. Komitmen bisa dibangun dengan menumbuhkan kepedulian bersama

terhadap isu konflik dan perdamaian di kawasan ini. Melalui kegiatan terus menerus berbagai pengalaman dan pengetahuan hasil riset dan aksi merespon berbagai isu konflik dan perdamaian akan dapat memperkuat komitmen kolektif mereka. Selain itu, juga perlu dibangun solidaritas dan tanggungjawab kolektif untuk tindakan kolektif bersama mengingat tantangan ke depan tidaklah ringan.

Penguatan SEACSN sebagai gerakan kolektif perdamaian merupakan agenda penting untuk periode 2005-2007 ke depan. Tantangan konflik dan ketidakstabilan kawasan ASEAN ke depan bukanlah semakin ringan. Berbagai konflik internal, seperti konflik self-determination, konflik komunal

sipil antar kelompok etnis dan agama, dan konflik negara dan masyarakat sipil hingga kini masih menghantui kita.

Menghadapi tantangan ini, khusus untuk SEACSN-Indonesia, kita akan memperkuat jaringan di kalangan akademisi dan praktisi untuk penguatan koalisi sipil Indonesia. Kita punya agenda membentuk komite nasional beranggotakan kalangan akademisi dan praktisi dari berbagai daerah dari Aceh hingga Papua. Melalui riset, lokakarya, dan publikasi isu-isu konflik dan perdamaian mutakhir kita berusaha menumbuhkan komitmen sekaligus merumuskan tindakan kolektif untuk merespon berbagai persoalan konflik dan kekerasan di Indonesia. ❖

## Membaca Kembali Konflik di Asia Tenggara

### KAJIAN BUKU

*The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asian Conflict: Cases and Resolutions*

editor : Lambang Trijono  
halaman : XII + 288  
penerbit : CSPS Books, 2004

Asia Tenggara yang sarat konflik meminta perhatian. Konflik melibatkan banyak kelompok, meninggalkan luka, merenggut sekian banyak jiwa manusia. Dalam konflik berbagai kepentingan yang kontras saling membidik, menikam, menerobos batas-batas perikemanusiaan yang pernah dengan susah payah dipelihara, dan merusak kohesivitas sosial. Atas dasar perdamaian dan motif pembaharuan kembali dunia sosial yang tercabik tersebut, buku dengan judul *'The Making of Ethnic and Religious Conflict in Southeast Asia: Cases and Resolutions'* diterbitkan PSKP UGM.

Mengambil format laporan penelitian dan pemikiran tentang konflik regional, buku ini menyajikan garis besar pemahaman komprehensif tentang pelbagai model konflik yang mencirikan kawasan ini. Yang membedakan analisisnya dari pendekatan-pende-

katan konvensional lain adalah bahwa *pendekatan refleksif* (reflexive approach) lebih tajam dan mencakup banyak aspek genealogis konflik. Sebagaimana ditulis L Trijono, baik pendekatan primordialist, instrumentalist maupun pendekatan konstruktivist mengandung keterbatasan dalam menguraikan sebab, proses, dan akibat konflik. Ketiga pendekatan konvensional ini terjebak dalam analisis aspektual, yang dengan demikian kehilangan kapasitas hermenetik konflik yang memadai. Buku ini menegaskan bahwa konteks dan dimensi adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yang tentunya tidak memadai jika dikaji secara terpisah.

Kasus determinasi-diri di Aceh dan Mindanao merupakan kasus yang paling banyak dibahas dalam buku ini. Fuad Mardhatillah menegaskan pengaruh praktik politik dominasi Orde Baru terhadap kebangkitan kesadaran politik dan sejarah lokal masyarakat Aceh. Kebijakan pembangunan berorientasi negara, selain mengandalkan kekerasan militer untuk legitimasi kekuasaan, juga merongrong martabat masyarakat lokal dan menghisap habis sumber daya yang tersedia. Jamail Kamlian melaporkan kasus sejenis di Filipina.

Dalam laporannya tentang konflik Maluku, L Trijono dan Tanamal menjelaskan bagaimana pluralisme etnis-religius yang tidak terakomodasi secara ekonomi-politik berubah menjadi medan kompetisi simbolik, di mana keterasingan dan kekecewaan menjurus kepada dendam dan sikap saling curiga di antara kelompok etnis-religius. Sementara K Abdullah (*Islamic Militancy in Malaysia*) menguraikan kemelut fundamentalisme Islam di Malaysia. Perkara menjadi berkepanjangan karena pemerintah Malaysia lebih suka bernegosiasi dengan senjata ketimbang persuasi-persuasi konkret.

Ketika negara tidak lagi sebagai mediator, melainkan aktor konflik, kekuatan dialog di antara masyarakat sipil menjadi pertarungan. Soliman Santos menawarkan rumusan model perdamaian berpulang kepada ada atau tidaknya dasar-dasar *commonalities* yang mengikat kebersamaan dua kelompok etnis-religius yang bertikai. Dalam hal ini Muslim dan Kristen di Filipina maupun Ambon memiliki basis itu. Tulisan lain dari praktisi konflik, S Rizal Panggabean dan Clem McCartney, membahas khusus soal strategi resolusi konflik yang sifatnya konfrehensif.

Akhirnya, buku ini juga didedikasikan untuk meruntuhkan klaim kebenaran dari adagium realisme konflik lama, *si vis pacem, para bellum*. Selamat membaca. ❖

## Riset Konflik Etnik di Indonesia

Mengapa api konflik etnis dan agama di Indonesia begitu sulit dan lama dipadamkan? Mungkin karena memang Indonesia tak punya 'resep' untuk itu. Penelitian berkaitan dengan ini menjadi begitu penting. Pada 19-20 Maret 2004, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM mengadakan lokakarya singkat mengenai *Konflik etnis dan Masyarakat Sipil di Indonesia*. Lokakarya dilakukan sebagai persiapan untuk penelitian di beberapa kota di Indonesia yang terkait dengan konflik etnis, dan menggali lagi peran masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik etnis.

Adapun daerah penelitiannya adalah meliputi Poso, Palu, Manado, Ambon, Surakarta dan Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut untuk menjawab hipotesa sebagai berikut. 1. Apakah ada *inter-communal engagement* dalam masyarakat di daerah konflik, 2. Apakah ada *intra-communal engagement* dalam masyarakat tersebut; 3. Apakah peran negara dalam mengelola konflik.

Adalah Professor Ashutosh Varshney, dosen Ilmu Politik Universitas Michigan yang mendasari hipotesa tersebut. arshney pernah menulis buku *Hindu-*

*Muslim relations* yang didasarkan pada penelitian mengenai relasi Hindu-Muslim di India, yang menghabiskan waktu sembilan tahun. Kini Prof. Varshney ingin mengembangkan hipotesa tersebut di negara yang lain. Tiga hipotesa diatas sudah pernah diterapkan di negara lain seperti Malaysia, Nigeria, India, Srilangka. Nigeria menjadi negara yang menarik untuk diperbandingkan dengan Indonesia, karena Nigeria mempunyai banyak kemiripan dengan Indonesia dalam hal kemajemukan etnis, agama, dan sama-sama negara yang mempunyai sumber uang dari minyak. Namun, kata Varshney, hubungan antara Muslim-Kristen di Indonesia merupakan fenomena baru karena konflik Muslim-Kristen di Indonesia terjadi awal tahun 1990.

Menarik pula untuk mengkaji lebih dalam kenapa Indonesia jadi

negara yang begitu banyak kerusuhan berdarah setelah tahun 1998. Kerusuhan Mei 98 misalnya, padahal sebelum tahun 98 masyarakat seperti hidup aman. Kerusuhan antar agama dan etnis pasca 98 juga terjadi, padahal sebelumnya hubungan Muslim-Kristen atau Pribumi-Cina berjalan baik.

Penelitian tersebut akan berlangsung selama satu tahun dan melibatkan peneliti lokal dari enam kota. Kemajemukan peneliti juga diharapkan membawa hasil yang lebih maksimal. Katagori areanya juga sangat beragam meliputi daerah yang eksklusif, dominan, campuran, dan daerah dengan kemajemukan lain. Sebelum penelitian ini dilakukan, United Nation for Support for Indonesian Recovery (UNSFIR) sudah melakukan pengumpulan data untuk konflik etnis/komunal di Indonesia. Terkait dengan penelitian ini juga *pilot study* sudah dilakukan oleh UNSFIR di Manado dan Ambon. Apakah hasil penelitian akan menunjukkan kebenaran 3 hipotesis diatas, ataupun akan muncul satu fakta baru berkaitan dengan Indonesia? Akan merupakan hasil yang menarik untuk ditunggu. ❖ (Widi, staff peneliti PSKP UGM).

### BITTER JOKE

Awal February 2000, kami sedang duduk-duduk di sebuah wilayah satu komunitas yang sedang konflik di Ambon. Konflik dengan kekerasan antara komunitas Muslim dan Kristen waktu itu masih memanas. Tiba-tiba sebuah sepeda motor dengan dua pemuda di atasnya terpeleset dan jatuh. Spontan enam anak muda diantara mereka yang duduk-duduk datang menolong. Dua pemuda yang jatuh itu dibantu berdiri, lukanya diobati dengan obat merah. Juga sepeda motor yang stangnya bengkok dibantu meluruskannya. Dua pemuda yang mengalami kecelakaan tersebut merasa baikan dan siap untuk pergi. Mereka mengucapkan terimakasih pada para penolongnya. Muncullah perkara, karena mereka mengucapkan terimakasih menurut tatacara komunitas mereka. Sementara para penolong berasal dari lain. Akibatnya fatal, para penolong tidak terima. Dua pemuda yang baru saja mereka tolong itu lantas dipukuli beramai-ramai. Untung nasib mereka terselamatkan ketika dua tentara datang, dan membawa mereka pulang ke komunitasnya. Di luar ada tanggapan negatif atas peran tentara dalam konflik, apa yang dilakukan dua tentara yang menolong dua pemuda itu adalah contoh dari peran tentara yang seharusnya. © (Arifah)

## Pembangunan dan Perdamaian berkelanjutan

Yogyakarta, 24-30 Mei 2004. Selama enam hari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM bekerjasama dengan UNDP menyelenggarakan Training of Facilitator bertema : "Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan,". Sesudah training dilanjutkan dengan pelaksanaan miniworkshop selama tiga hari di mana peserta training berkesempatan melakukan praktek sebagai fasilitator.

Peserta training datang dari Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Mereka terdiri dari

kalangan pemerintah, aktivis LSM, juga tokoh/elemen masyarakat sipil lain, yang aktif berjuang dalam menegakkan perdamaian di daerahnya masing-masing. Tujuan dari Training maupun workshop adalah selain mempertemukan berbagai pihak, juga mendorong proses pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan.

Kepala PSKP UGM Lambang Trijono mengatakan dari Training para peserta diharapkan memahami teori dasar tentang konflik dan perdamaian. Memahami

potensi diri akan kapasitas dan kerentanan di daerah masing-masing. Mereka juga diharapkan paham tentang konsep pembangunan. Mengerti sisi positif dan negatif pembangunan. Dan mampu memahami bagaimana melakukan *set up* pembangunan yang mendukung upaya-upaya perdamaian yang berkelanjutan. Peserta akan berbagi pengalaman dalam penanganan konflik dengan PSKP UGM maupun UNDP. David Nyeim dan Eugenia Lopes dari UNDP pada kesempatan itu memaparkan pengalaman

penanganan konflik dari berbagai negara dan bagaimana pendekatan pembangunan mesti dilakukan untuk membuat perdamaian bisa berjalan dan berkelanjutan. Ibarat membangun rumah, maka perencanaan atas bangunan dilakukan dari awal, dan bagaimana pihak-pihak mesti dilibatkan.

Sebagian peserta yang sudah mengikuti training dan berpraktek sebagai fasilitator di miniworkshop, akan pulang ke daerah masing-masing. Mereka diharapkan tidak hanya handal sebagai fasilitator, tapi

juga secara nyata paham permasalahan perdamaian dan pembangunan. Mereka diharapkan lebih bersemangat dan menjadi salah satu pihak paling penting di tempatnya masing-masing dalam memperjuangkan lestarinya perdamaian.

Pada miniworkshop selama 3 hari di Wisma Gadjahmada Yogyakarta, mahasiswa maupun aktivis yang berasal dari Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang sedang berada di Yogyakarta, diundang sebagai peserta. ♦

## PROFIL

### Otto Syamsudin Ishak

Begitu banyak kekonyolan terjadi di Aceh ketika pemerintahan Suharto menetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada 90an. Diantara kekonyolan itu berlangsung paa pemilu 1992. Sebagaimana di tempat lain di Indonesia, pemilu di Aceh pada 1992 adalah upaya pemaksaan untuk memenangkan Golkar, partai milik pemerintah. Jika Golkar menang, maka kekuasaan presiden Suharto langgeng.

Karenanya, kampanye partai non-Golkar di Aceh, diganggu serdadu. Aparat keamanan juga menetapkan kemenangan Golkar harus mencapai di atas 110 persen. “Ketika kemenangan Golkar mencapai 108 persen ada sejumlah penduduk Aceh dikumpulkan tentara dan direndam di sungai,” ujar Otto Syamsudin Ishak, seorang peneliti dari Universitas Syiah Kuala, propinsi Nangro Actjeh Darussalam (NAD) mengungkapkan tentang pemilu di masa DOM di Aceh.

Kini, pemilu 2004 juga akan dilakukan di wilayah Aceh, dalam suasana Nagro Aceh Darusalam (NAD) dalam Darurat Militer, yang ditetapkan pemerintahan Presiden Megawati. Otto kembali menjadi salah satu saksi tentang apa yang akan terjadi di Aceh atas rakyatnya yang ikut pemilu. Otto adalah warga Aceh kelahiran Yogyakarta, 14 Okt 1959. Anak ke 3 dari 6 bersaudara dari ayah yang asli Aceh dan Ibu yang dari Kebumen, Jawa Tengah.

Otto dibesarkan orangtuanya di Banda Aceh hingga selesai SMA. Sebelum kembali ke kota

kelahiran, Yogyakarta pada 1979, Otto sempat kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) namun gagal pada 1978. Sebenarnya ada keinginan yang kuat darinya untuk studi di bidang politik di Yogyakarta. Namun keinginannya ini ditolak orangtuanya. Ia akhirnya kuliah di Fakultas Geografi UGM hingga lulus, tapi kuliahnya di Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) tidak selesai.

Di Yogya, Otto belajar tidak hanya dalam kompetisi akademik dalam seminar mahasiswa tapi juga kompetisi politik kecil-kecilan yang di mulai di Fakultas Geografi dengan “bau” politik aliran dan agama. Dari persoalan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kompetisi perebutan senat mahasiswa hingga pendirian mushalla di Fakultas. Waktu itu penetrasi negara ke dunia mahasiswa sedang kuat-kuatnya. HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam, sebagaimana ormas lain, dipaksa Orde Baru menerima asas tunggal Pancasila. Bagaimana mahasiswa waktu itu harus berhadapan tidak hanya dengan

para alumninya yang meminta mereka menerima asas tunggal, tapi juga harus berhadapan dengan para intel dalam berbagai pelatihan. “Persoalan ini memberikan pelajaran pertama kegetiran represi dari Pemerintah,” ujar Otto.

Otto lalu kembali ke Aceh, 1998, dan langsung dihadapkan pada soal pelanggaran HAM. Ia mulai melakukan pendataan atau kumpul klipping tentang apa yang diberitakan oleh kaum jurnalis – atas dasar sumber siaran pers atau opini kaum serdadu— sebagai kebrutalan GPK. Ketika Hendar di dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan seorang konsul kedutaan asing menghubunginya sehubungan dengan berbagai kejahatan kemanusiaan itu, maka Otto mulai masuk lebih jauh ke persoalan HAM.

Di kampus Universitas Syiah Kuala dimana Otto mengajar sosiologi, tidak ada wacana tentang HAM. Namun, Otto mulai membangun kelompok diskusi yang sensitif terhadap realitas sosial, seperti kemiskinan, korupsi dan membangun kesadaran kritis terhadap sejarah Aceh.

Pada 1996 Otto bersama sejumlah kawannya mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk menyongsong Pemilu 1997. Karena langkah itu ia sudah menempatkan diri sebagai incaran intelijen tentara Indonesia.



# Konflik Papua: Kerjasama Negara dan masyarakat dalam resolusi konflik

oleh Arifah Rahmawati

Isu identitas kebudayaan Papua dalam Negara kesatuan RI telah muncul di atas pentas politik Indonesia selama 5 tahun terakhir. Tulisan ini bertujuan untuk membantu memahami konflik di propinsi Papua di mana masyarakat lokal menggunakan identitas etnis untuk mempersoalkan legitimasi Negara Indonesia di propinsi tersebut. Tulisan ini pun menyiratkan bahwa dalam rangka menyelesaikan persoalan baik pemerintahan Indonesia maupun kelompok-kelompok politik etnis Papua harus mampu bernegosiasi untuk menemukan solusi dan meluruskan kembali sejarah masa lalu mereka. Berbagai kebijakan pemerintah seharusnya berkenan bagi orang Papua dan mereka pun semestinya menyambut kebijakan itu. Dengan kata lain, resolusi konflik Papua menuntut adanya kerjasama antara Negara dan komunitas Papua.

Pemerintahan RI dihadapkan dengan permintaan desentralisasi dari berbagai propinsi. Proses desentralisasi pemerintahan dan pembagian kekuasaan boleh jadi tetap merupakan satu keniscayaan. Pemerintah Indonesia mestinya mengidentifikasi program-program reformasi yang akan mengintegrasikan propinsi Papua secara penuh ke dalam Indonesia. Opsi ini dapat merupakan satu peralihan yang mendasar. Resolusi konflik Papua dapat menjadi satu model perfensi konflik berskala nasional.

## Konflik Papua

Konflik Papua terjadi sebagai akibat sebab-sebab historis dan sosial yang dalam yang diperparah oleh ketidakpuasan dan ketidakmerataan. Kelompok-kelompok orang Papua memunculkan protes berkenaan dengan eksploitasi tanah dan sumber daya alam, menuntut perlindungan terhadap identitas pribumi dan pemeliharaan tradisi-tradisi mereka dan mengusahakan keadilan, kesamaan hak, kesempatan, dan satu peran yang lebih besar lagi bagi penduduk pribumi bagi pemerintahan propinsi.

Mengelompokkan konflik Papua sebagai "konflik politik-etnis" dimana konflik-konflik Papua berbicara atas nama kepentingan politik mereka berlawanan dengan Negara.<sup>1</sup> Kriteria etnis yang digunakan oleh kelompok Papua bukan hanya karena mereka adalah minoritas Melanesia yang berbeda

dari orang Indonesia yang lainnya. Tapi, lebih penting lagi mereka mewarisi sejarah, pengalaman dan kebudayaan lampau yang sama. Mereka mengusahakan hak-hak dan kesempatan akses yang sama terhadap kekuasaan dalam lingkaran politik yang ada. Karena itu klaim yang dibuat mencakup permintaan politik dan material sama halnya pula kebutuhan akan identitas kebudayaan. Strategi yang digunakan bervariasi mulai dari pemberontakan sampai demonstrasi juga protes-protes tanpa kekerasan, terhadap apa Negara merespon dengan represi dan akomodasi. Kelompok-kelompok gerilya OPM yang berserakan sebagai contoh sudah menunjukkan perlawanannya terhadap angkatan bersenjata Indonesia sejak propinsi tersebut menjadi propinsi ke-26 pada tahun 1969. Masyarakat Papua juga menggunakan strategi yang lain sebagaimana ditunjukkan strategi demonstrasi dan kampanye damai yang dilakukan di desa-desa hingga kota-kota.

Mereka membentuk satu Dewan politik pro kemerdekaan, Dewan Presidium Papua (DPP) pada bulan Juni 2000. DPP mengklaim menegaskan dirinya sebagai suatu organisasi inklusif yang diterima secara luas, sekaligus merepresentasikan berbagai aspirasi dari berbagai kelompok etnis Papua.<sup>2</sup>

Di pihak lain pemerintahan Indonesia, mensikapi perjuangan tersebut sebagai separatisme dan mempertimbangkan sebagai an-

caman terhadap integritas territorial Negara. Pemerintahan cenderung menunjukkan resistensi terhadap permintaan kelompok Papua tersebut sebagaimana dibuktikan menggunakan pendekatan militer. Secara politik, representasi di dalam birokrasi propinsi, seperti pengadilan, militer, polisi, partai politik, dan institusi politik lain, sangatlah rendah. Legitimasi dari sistem politik Indonesia secara keseluruhan digugat. Selanjutnya nasionalisme etnis Papua memiliki satu peluang untuk muncul sebagai respon terhadap ketidakmampuan institusi yang ada memenuhi kebutuhann dasar sebagaimana tidak tersediannya struktur alternative.

Secara ekonomi penduduk pribumi Papua melihat praktek yang tidak fair di dalam kesempatan ekonomi karena para pendatang mendominasi hamper semua sector ekonomi kecuali sector kebudayaan. Para pendatang juga memiliki akses yang lebih besar terhadap sumberdaya ekonomi seperti modal dan tanah. Penduduk pribumi pun tidak bisa menerima standar hidup yang berbeda dari para pendatang. Secara social proses transmigrasi baik yang disponsori pemerintah maupun spontan telah menciptakan dampak negatif seperti terjadinya kerumitan di dalam sistem nilai tradisional dan merongrong institusi politik tradisional tersebut.

Bersamaan dengan itu kekerasan politik yang terus meningkat di Papua memperlihatkan tantangan yang sulit bagi usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Sejauh ini respon polisi dan hukum yang dibuat pemerintah Indonesia tidak hanya menciptakan kekerasan tapi juga berimplikasi pada kemandekan politik. Meskipun sudah dipisahkan dari militer pada tahun 2000, tapi polisi Indonesia masih menggunakan cara militer untuk menakut-nakuti para aktivis pro-kemerdekaan. Para pemimpin faksi pro kemerdekaan secara damai di Papua dituduh memberontak dan menyebarkan kebencian. Kebiasaan menuduh para aktivis non militan

dengan menggunakan istilah “keterpengaruh” juga berakibat pada kebencian dan kemarahan serta merusak sikap saling percaya antara masyarakat dan pejabat pemerintah lokal.

### Resolusi konflik Papua

Propinsi Papua memperlihatkan tantangan adanya suatu transisi di Indonesia dimana sebuah pemerintahan lokal menuntut otonomi yang lebih. Bagi propinsi Papua, situasi ini merupakan pengalamam transisi politik. Hasil dari proses ini masih belum jelas, tapi diharapkan bahwa kebijakan “otonomi khusus” dari pemerintahan pusat menyediakan basis formal dan legal agar propinsi memerintah dirinya sendiri sekaligus memelihara identitas dan tradisinya yang unik.

Meski konflik antara pemerintah Indonesia dan kelompok etnis Papua, dapat menjadi sinyal bagi munculnya kasus Timor-Timur kedua, konflik Papua masih pada tahap yang bisa dikendalikan. Konflik dapat diselesaikan dan ditangani dengan partisipasi aktif dan niat baik dari semua kelompok yang berkepentingan. Berbagai kelompok yang bertikai mestinya memahami resolusi konflik merupakan proses institusionalisasi demokrasi di Indonesia dan itu mestinya merupakan proses yang berjangka panjang. Proses tersebut membutuhkan reformasi politik, social, maupun ekonomi pada level lokal maupun nasional. Di situ diperlukan satu proses rekonsiliasi pada level lokal untuk menangani konflik dengan cara yang lebih berkelanjutan. Para pemimpin lokal mestinya memahami baik isu maupun proses reformasi. Kebijakan pemerintahan Indonesia memberikan status “otonomi khusus” pada Papua sudah lebih akomodatif meskipun tetap ada resistensi. Dengan kebijakan tersebut propinsi Papua memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengembangkan keunikan lokalnya. Propinsi ini akan mendapatkan 80 persen dari hasil eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah pusat. Dan secara bersamaan hak-hak politik pribumi mendapatkan pengakuan yang lebih luas.

Kebijakan otonomi khusus tampaknya memuaskan harapan kelompok etnik Papua. Bagi pemerintah pusat, tantangannya adalah konsistensi pada reformasi. Selain itu pemerintah pusat harus mengatur kebalik mereka-mereka yang dulu diuntungkan oleh kebijakan yang terpusat, seperti perusahaan-perusahaan HPH, yang dulu pernah mendapat hak eksploitasi atas hutan-hutan Papua, tapi kemudian diprotes penduduk pribumi. Di pihak lain penduduk Papua harus mendukung dan berpartisipasi dalam proses reformasi. Mereka perlu mempersiapkan dan selalu sigap untuk mengambil tanggungjawab yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri di bawah kebijakan otonomi khusus. Sayangnya kondisi penduduk Papua yang kurang berkembang dan kurang terdidik merupakan tantangan yang paling besar bagi orang Papua sendiri. Keberagaman masyarakatnya yang mencakup lebih dari 300 suku tersebar di berbagai wilayah berimba, dataran tinggi, juga pulau-pulau, juga merupakan persoalan serius yang lain. Lebih urgen lagi, lembaga-lembaga lokal yang diminta untuk menangani sumberdaya masih belum memadai untuk tugas ini. Dalam hal ini penduduk Papua masih perlu bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk terus melanjutkan program pembangunan politik, ekonomi dan social. Mereka juga harus bekerjasama dengan pendatang. Ini mengisyaratkan satu identitas yang lebih inklusif dari berbagai kelompok etnik Papua sendiri sehingga mereka tidak hanya terdiri dari orang Papua asli tapi juga orang Papua.

Model pemerintahan lokal dengan keterlibatan lebih luas boleh jadi menjadi alasan yang dapat diterima bagi orang Papua, untuk tetap ikut menghormati bendera Indonesia. Meskipun demikian penguatan pemerintahan lokal tentu akan mendorong gerakan kemerdekaan. Pendekatan tersebut mendorong Indonesia untuk mendefinisikan kembali dari gambaran tradisional dari suatu Negara yang terpusat. Sebagai gantinya Indonesia harus menjadi bangsa multietnik, demokratik dan toleran. Basis

politik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” seharusnya memberikan jaminan agi toleransi etnik dan ras. Kebijakan otonomi khusus merupakan kebijakan jangka pendek dan perlu untuk merebut hati dan pikiran penduduk pribumi Papua. Meskipun demikian hal itu belum cukup. Diperlukan kebijakan-kebijakan lain untuk secara luas mengatasi tingkat ketegangan, kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer dan sayap militer gerakan kemerdekaan Papua. Dalam jangka panjang baik pemerintah maupun penduduk pribumi harus ikhlas keluar dari sejarah konflik bersama dan membangun dasar kerjasama jangka panjang bagi integrasi Papua ke dalam Indonesia.

### Kesimpulan

Tuntutan akan kesamaan keadilan partisipasi dan desentralisasi lebih luas bagi pemerintahan lokal, merupakan tantangan serius bagi pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini harus ditanggapi secara konsisten. Isyu partisipasi dan desentralisasi sebagai suatu metode perluasan dan perbaikan pelayanan publik pada gilirannya akan membantu pemerintahan memperoleh legitimasinya di mata warga Negara. Dengan demikian akan memperkuat stabilitasnya demokrasi.

Karena itu pemerintah Indonesia harus mengidentifikasi suatu cara akomodasi terhadap tuntutan-tuntutan tersebut. Satu rangkaian program reformasi yang akan mengintegrasikan propinsi Papua secara penuh ke dalam Indonesia dapat merupakan suatu pilihan yang mendasar. Apabila pemerintah Indonesia tidak mampu menangani konflik, maka kemampuan untuk menciptakan suatu Negara yang stabil dan modern harus digugat. ❖

### Catatan

1. The Council on Foreign Relations, “Indonesia Commission: Peace and Progress in Papua” in *Report of an Independent Commission*, 2003, p. 105.
2. Ted Robert Gurr, “Minorities, Nationalists, and Conflict” in *Managing Global Chaos* (Washington D.C.: USIP Press) 1996, p. 53.



## Perkembangan Perdamaian di Thailand

Berbagai komunitas agama di Thailand dapat hidup dengan nyaman tanpa kecurigaan dan kebencian. Masing-masing komunitas keagamaan sadar bahwa dalam kehidupan sosial, hal yang paling penting adalah mempertahankan perdamaian dalam kehidupan mereka sendiri. Sikap saling menghormati di masyarakat Thailand sangat kuat menyerupai suatu norma yang sangat suci. Berdasarkan riset di lapangan, penulis menemukan hampir semua anggota keagamaan menunjukkan konsep hubungan social melalui prinsip dasar social berikut. *Pertama* mereka menjunjung tinggi agama sebagai agama pribadi dan agama privat itu tetap berlangsung dalam lingkungan yang terbatas. Penganut Buddha beribadah di kuil, muslim di masjid, Kristen di gereja. Mereka tak akan bicara banyak menyangkut agama lain. Mereka tak mengganggu gugat karena merasa tidak berkepentingan. Jika mereka ingin mengetahui soal keagamaan, mereka akan membuat ruang diskusi yang serius. Misalnya, sekolah Buddha mengundang guru Kristen dan muslim untuk mengajari mereka tentang Islam dan Kristen.

Komunitas agama di Thailand, juga tidak akan memanfaatkan agama mereka dalam organisasi, seperti di pasar atau di sekolah. Sebaliknya mereka selalu menghormati prinsip agama lain. Dalam pengertian yang terbatas, agama dapat saja menjadi kode etik untuk menghormati sesama tanpa sentimen keagamaan. Sebagai contoh, banyak penganut Buddha selalu membeli makanan dari penjual muslim. Beberapa diantara mereka memiliki hubungan bisnis. Dalam kasus yang berbeda penganut Buddha tersebut mengingatkan kaum muslim yang pergi ke pasar untuk waspada terhadap daging babidan jenis makanan lainnya yang dilarang bagi muslim. Di sini lain kaum muslim membantu proses pembangunan di sekitar pasar dan di sekitar tempat tinggal komunitas Buddha. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bagaimana mereka tidak melakukan intervensi terhadap orang lain, tapi berusaha mempertahankan keharmonisan satu dengan yang lain.

Masyarakat Thailand dapat membedakan dengan mudah area public dan area privat. Dua prinsip dasar tersebut dapat mempertahankan keharmonisan sosial. Berbagai komunitas keagamaan berusaha untuk memelihara kehidupan yang harmonis. Kita dapat membuktikan nilai ini dalam

kasus-kasus; sebagaimana diceritakan penduduk muslim di propinsi Khon Kaen. Suatu kali seorang guru di sekolah dasar tersebut mengatakan kepada seorang murid muslim, "Kamu harusnya kembali ke rumah karena kamu ini Ben Laden. Di sini tak ada tempat untukmu." Atas kejadian itu sang guru yang ceroboh itu mendapat hukuman dari sekolah. Lebih dari itu masyarakat sekitar menolak pernyataan sang guru tersebut.

Kasus ini menggambarkan mekanisme sosial yang menggunakan prinsip dasar dari komunitas keagamaan, agama sebagai kehidupan pribadi dan respek terhadap masyarakat lain tanpa motif keagamaan. Prinsip dasar tersebut dapat menjadi bola salju untuk membangun perdamaian di Thailand.

Akan tetapi yang menarik adalah mengapa masyarakat keagamaan di Thailand dapat sampai kepada prinsip yang luar biasa itu?

### ■ Otto Syamsudin

*Sambungan dari halaman 6*

Kaum serdadu dan politikus bersekongkol menggalang 36 Ormas dan OKP di Aceh—termasuk HMI— untuk membuat pernyataan menolak kehadiran KIPP. KIPP kemudian menjadi embrio kelompok kritis di Aceh, di masa DOM.

Menurut Otto, hal yang tetap

David A. Wilson (1966) dalam buku *The Politics of Thailand* memberikan jawaban soal ini. Bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan mengapa masyarakat keagamaan di Thailand 1. memiliki karakter yang longgar dalam perbandingannya dengan masyarakat lain di kawasan Asia lain termasuk masyarakat Indonesia, yang berbagai pola solidaritas komunitasnya lemah. 2. Cairnya karakteristik status social baik pada Thailand tradisional dan Thailand modern tampak berkorelasi secara alamiah dengan kepribadian yang individualistik. 3. Nilai-nilai sosial dari agama di Thailand dipengaruhi oleh karakter masyarakatnya (yang longgar dan cair). Dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar dalam keagamaan di Thailand banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat.

Sebagai perbandingan, konflik kekerasan seperti di Ambon dan Kalimantan di Indonesia dipengaruhi oleh kuatnya komunalisme atau solidaritas yang berlebihan. Ketika isu agama muncul dalam masyarakat yang kuat solidaritas komunitasnya, isu tersebut cepat berkembang seperti epidemi. Lebih dari itu interpretasi keagamaan digunakan sebagai kepentingan politik. Sebaliknya dalam masyarakat Thailand, perkembangan perdamaian dalam kehidupan sosial jauh lebih mudah. Masyarakat Thailand dengan prinsip dasar akan dengan sendirinya mempertahankan keharmonisan sosial. Bagaimana dengan Indonesia? ❖ (Novri Susan)

penting untuk ke depan adalah dilakukannya pencatatan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Aceh. Hal lain yang penting adalah menjaga energi agar tetap bagus hingga bisa bekerja mencatat perilaku dan memburu pelaku pelanggaran HAM tersebut. Di samping membantu para korban untuk menyehatkan kehidupannya, dan mempersiapkan mereka untuk memperjuangkan keadilan. ❖

## Seremoni Penerimaan Mahasiswa Baru MPRK

Petang, 9 Februari 2004 itu. Ruang tamu Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dipenuhi oleh sekitar 20 orang yang datang untuk makan malam yang bersahaja. Pengelola program studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) petang itu menerima 13 orang mahasiswa baru angkatan ke tiga. Para mahasiswa datang dari berbagai wilayah Indonesia seperti, Aceh, Maluku, Papua, dan Jawa. Mereka datang dari latar belakang pekerjaan beragam, dari pegawai negeri hingga NGO serta agamawan, juga tenaga pengajar.

Prof. Ichlasul Amal, Ketua Pengelola Program MPRK memberi sambutan selamat datang. Mantan Rektor UGM yang kini menjadi Ketua Dewan Pers ini mengatakan, permasalahan bangsa Indonesia pasca tumbangannya rejim Orde Baru, membutuhkan pemikiran yang serius untuk memecahkannya. Tapi, banyak pihak di pemerintahan pada bingung menghadapinya. Diantara yang kini dalam kebingungan adalah orang-orang yang bekerja di sektor kehutanan. Konflik masyarakat dengan pengelola hutan pemerintah, ternyata tidak bisa dihadapi dengan pendekatan dan pemahaman teknis kehutanan. Pengelolaan hutan yang lestari, ternyata tidak cukup hanya dengan pemahaman teknis kehutanan saja. “Karena itu penting bagi para profesional untuk paham bagaimana menangani konflik sosial yang terjadi,” ujar Ichlasul Amal.

Dalam acara ramah tamah, semua mahasiswa baru menyampaikannya alasan mengapa mengikuti program MPRK. Ade Suharso, pegawai Kehutanan dari kantor pusat di Jakarta, yang ditugaskan di Bontang, Kalimantan, mengatakan masuk MPRK untuk membekali diri memahami perma-

salahan kehutanan. Dari proses perusahaan hutan hingga pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU nomor 22, dimana Pemerintah Pusat pada dasarnya belum sepenuhnya percaya pada daerah. Dalam pengelolaan hutan, daerah tidak dipercaya pusat karena pusat menganggap daerah hanya pengejar pendapatan asli daerah (PAD) saja. “Potensi konflik Pusat Daerah, juga antara pengelola hutan dengan rakyat, tinggi. Saya masuk MPRK agar punya bekal ilmu agar mampu memecahkan masalah,” ujar Ade.

Jusuf Nikolas Anamova, mahasiswa dari Maluku mengatakan, ia memutuskan mengikuti program MPRK dengan beberapa alasan. Maluku adalah daerah perang sipil berbau agama paling parah di Indonesia. Jusuf yang Kristen, mengaku disemangati kawannya yang muslim untuk mengambil program MPRK agar bekal ilmu dalam penanganan konflik Maluku semakin baik.

Menurut Jusuf, pemahaman *scientific* yang lebih baik dalam menangani konflik adalah penting bagi Maluku, karena berlarutnya konflik di Maluku salah satu sebabnya karena pihak-pihak yang ingin damai, tidak dibekali dengan

ilmu yang memadai untuk memadamkan konflik. Alasan yang lebih personal dimiliki pula oleh Jusuf. Dalam konflik Maluku, ia adalah korban. “Saya tak ingin konflik terjadi lagi di Ambon, saya masuk MPRK untuk itu,” ujar Jusuf.

Pastor Urotosastro mengatakan ia mengambil program MPRK untuk melengkapi bahan disertasi S-3nya yang sedang dikerjakannya di Universitas Roma, Italia. “Disertasi S-3 saya tentang resolusi konflik, dan studi MPRK akan mendukung kebutuhan itu. Ini adalah program studi yang penting di Asia Tenggara,” ujar Urotosastro yang mengetahui program ini dari internet.

Menurut Samsu Rizal Panggabean, pengelola MPRK, Mata kuliah yang ditawarkan untuk angkatan III ini juga sedikit bervariasi dimana pada semester I mahasiswa diberi kesempatan memilih mata kuliah pilihan yang ditawarkan seperti Analisis Strategis, Hubungan-Hubungan antar Lembaga, Hukum dan Resolusi Konflik, Konflik Industri, and Ekonomi Politik Pembangunan. Adapun mata kuliah yang diwajibkan untuk diambil antara lain Keamanan Kemanusiaan, Ruang Lingkup Perdamaian dan Resolusi Konflik, Filsafat Resolusi Konflik, dan Manajemen Konflik I. Di semester II mahasiswa juga bisa memilih mata kuliah pilihannya sesuai dengan minat relevansi terhadap latar belakang profesinya. Diharapkan pada di akhir semester II mahasiswa sudah mempersiapkan diri dengan judul proposal, sehingga pada semester III mereka sudah bisa turun ke lapangan dan menulis tesis. Program interdisipliner MPRK mempunyai fokus kepada *Peace and Conflict Resolution* yang pertama di Asia Tenggara. ❖ (Widi)